



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **KUWAT TRIYANA**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **814568**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 4.975.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m<sup>2</sup>/163 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 805.000.000
2. Tanah Seluas 1668 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000
3. Tanah Seluas 1385 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 165.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 437.300.000**

1. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.800.000
3. MOTOR, HONDA AT11121B01 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
6. MOBIL, HONDA HRV SE 1.5 E PLUS CVT CKD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 290.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.198.425.791
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.900.725.791
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.900.725.791

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.